

**EKSISTENSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM  
PENANGANAN KASUS KEWARISAN ANAK  
(Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Makssar)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Islam Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**RIDHO WIBOWO**  
**NIM:10300111050**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridho Wibowo  
NIM : 10300111050  
Tempat/tgl. Lahir : Barru 09 Juni 1994  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jl. Datuk Ripanggentungan Utara  
Judul : Eksistensi Balai Harta Peninggalan Dalam Penanganan Kasus Kewarisan Anak (Studi Kasus di Balai Harta Peninggalan Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Desember, 2015

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALA UDDIN**  
MAKASSAR  
Ridho Wibowo  
NIM: 10300111050

## KATA PENGANTAR



Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup kurang lebih 4 (tahun) begitu terasa dalam sanubari. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, menyita waktu, tenaga, dan pikiran, dapat dapat merampungkan skripsi ini. Oleh karena itu, sembari berserah diri dalam kerendahan hati dan kenistaan diri sebagai seorang hamba, maka sepantasnyalah puji syukur hanya diperuntukan kepada Sang Maha Sutradara, Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan maghfirah-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., suri tauladan seluruh umat manusia, penyusun kirimkan shalawat dan salam kepada beliau serta para sahabat yang telah memperjuangkan Islam sebagai agama samawi sekaligus sebagai aturan hidup.

Sebagai bagian dari seluruh makhluk Tuhan Allah swt. yang sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. maka tepatlah bila menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada sederatan hamba Allah swt. yang telah memberikan sumbangsih baik berupa bimbingan, dorongan, dan bantuan yang diberikan, kiranya dicatat oleh Allah swt. sebagai amal saleh. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Rowandi dan Ibunda Supamiyarsi, semoga Allah swt. melimpahkan Ridho-Nya kepada keduanya. Sebagaimana dia mendidik penyusun semenjak kecil, yang atas asuhan, limpahan kasih sayang serta dorongan dari keduanya, penyusun selalu memperoleh kekuatan materil dan moril dalam mendapati pencarian hakikat diri.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh pembantu dekan.
3. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M. Si. selaku Ketua Jurusan dan Dr. Kurniati, M.HI selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang telah memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk, dan saran, sehingga penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. H, Ahmad M Sewang, M.A, dan Drs. H. M Gazali Suyuti, M. HI. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh dedikasi, keiklasan, dan kesabaran meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing, memberikan masukan-masukan keilmuan yang sangat berharga hingga saat selesainya penyusun skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang pernah mengajar dan membimbing. Permohonan maaf apabila ada perbuatan, ucapan serta tingkah laku yang tidak sepatutnya pernah penulis lakukan.

6. Kepala perpustakaan beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Ahmad Yani, APT selaku Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen (Bid. Serlik) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Makassar yang telah memberikan kemudahan kepada penulis saat melakukan penelitian di instansi tersebut.
8. Saudara-saudara seperjuangan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK) angkatan 2011 terima kasih atas kebersamaanya selama 4 tahun.

Upaya maksimal telah dilakukan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Amin

*Wassalamu' Alaikum Wr. Wb*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Makassar, 18 Desember, 2015

Penyusun,

Muh. Syarkawi Bahrul

NIM: 10300111042

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum tentang Kewarisan.....	11
B. Tinjauan Umum Pembagian Harta Warisan .....	16
C. Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan .....	25
D. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya.....	27
E. Tinjauan Tentang Balai Harta Peninggalan (BHP).....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	40
C. Sumber Data.....	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	41
E. Instrumen Penelitian.....	42
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	43
G. Pengujian Keabsahan Data.....	44

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....46**

- A. Sejarah Singkat, Tugas Fungsi dan Dasar Hukum Balai Harta Peninggalan ..... 46
- B. Peranan Balai Harta Peninggalan Dalam Melakukan Pengawasan Wali dan Harta Anak ..... 52
- C. Pembagian Waris Menurut Islam..... 58
- D. Kewarisan Menurut Hukum Islam..... 65

**BAB V PENUTUP.....72**

- A. Kesimpulan ..... 72
- B. Saran..... 74

**DAFTAR PUSTAKA ..... 75**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman beriku:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengantitikdiatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet(dengantitikdiatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Sad	S	Es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengantitik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet(dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	apostrofterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em



ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathahdanya</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *hau*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTan da	Nama
اَ...   اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> a u y a	a	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	i	i dan garis di atas
اُ...	<i>dammah</i> dan <i>wa</i> u	u	u dan garis di atas

Contoh: مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

### 4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh: رَبَّنَا : *rabbana*  
نَجِّنَا : *najjaina*  
الْحَقُّ : *al-haqq*  
الْحَجَّ : *al-hajj*  
نُعِمْ : *nu‘ima*  
عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh: عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)  
عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh: الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh: تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fi Zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِذْنِ اللَّهِ *dinullah* بِإِذْنِ اللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa ma Muhammadunillarasul*

*Innaawwalabaitinwudi 'alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan*

*Syahrul Ramadan al-laziunzilafih al-Qur'a>n*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abu>

(bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## ***B. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

UIN = Universitas Islam Negeri

HPK = Hukum Pidana Ketatanegaraan

UU = Undang-Undang

RUU = Rancangan Undang-undang

BHP = Balai Harta Peninggalan

RI = Republik Indonesia

HAM = Hak Asasi Manusia

swt. = Subhanau wa ta'ala

saw. = Sallallahu 'alaihi wa sallam

QS.../..... = QS al Baqarah/2: 168, QS at Taubah: 29

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	الى اخرها\ الى اخره
ج	=	جزء



## **ABSTRAK**

Nama : Ridho Wibowo  
Nim : 10300111050  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Judul : Eksistensi Balai Harta Peninggalan Dalam Penanganan Kasus Kewarisan Anak (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Makassar)

---

Skripsi ini menjelaskan permasalahan: 1). Bagaimana tugas Balai Harta Peninggalan mengenai pengelolaan harta peninggalan dalam kasus penanganan anak ? 2). Bagaimana cara pembagian Harta warisan ? 3). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta dalam kasus penanganan anak ?

Penyelesaian masalah tersebut, menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian skripsi ini penulis langsung meneliti di Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar untuk data yang diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini dengan menggunakan metode wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung Anggota Tehnisi Hukum (BHP) Makassar.

Dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa, Balai Harta Peninggalan (BHP) balai harta peninggalan adalah sebagai Selaku wali pengawas dan wali sementara, Pengampu pengawas dalam pengampu dan pengampuan anak dalam kandungan, sekaligus Pembukaan dan pendaftaran surat wasiat tertutup atau rahasia dan wasiat umum. Sedangkan cara pembagian warisan yaitu Apabila pewaris (orang yang meninggal) hanya mempunyai seorang anak laki-laki perempuan, maka harta peninggalannya di bagi untuk keduanya. Anak laki-laki mendapat dua bagian sedangkan anak perempuan satu bagian, dan apabila ahli waris berjumlah banyak terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan maka bagian untuk laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. adapun pandangan Hukum Islam mengenai kewarisan anak adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peran Balai Harta Peninggalan dalam kasus kewarisan anak telah sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari peran Balai Harta Peninggalan dalam menyelesaikan kasus kewarisan anak yang ada dikota Makassar.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa pengecualian, seperti hak seseorang bapak untuk menyangkal sahnyanya seorang anak dan hak seorang anak untuk menyangkal sahnyanya seorang ayah dan seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh Undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>1</sup>

Pada dasarnya tidak semua ahli waris mendapat warisan dari pewaris orang-orang yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris adalah:, mereka yang telah dihukum dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si yang meninggal (Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata, Pasal 172 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), mereka dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat (Pasal 838 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 172 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, mereka yang

---

<sup>1</sup> Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta Sinar Grafika, 2005), h. 131

dengan kekerasan atau perbuatan yang tidak mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya (Pasal 838 ayat (3) KUH Perdata), mereka yang telah menggelapkan merusak atau memalsukan surat wasiat Si yang meninggal (Pasal 838 ayat (4) KUH Perdata).

Orang-orang yang berhak menerima warisan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu karena, ditentukan oleh undang-undang dan wasiat. Ahli waris karena undang-undang adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli waris karena UU ini diatur didalam pasal 832 KUH Perdata ditentukan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris adalah, para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin, suami atau istri yang hidup terlama. Sedangkan ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat (testamen) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkannya dalam surat wasiat. Surat wasiat testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang di kehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia.<sup>2</sup>

Penggolongan ahli waris itu dapat disimpulkan sebagai berikut:, Golongan 1 meliputi (suami/istri, anak, keturunan anak). Golongan II meliputi (ayah dan ibu, saudara, keturunan). Golongan III meliputi (kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu, orang tua kakek dan nenek itu dan seterusnya ke atas). Golongan IV meliputi (paman dan bibi baik dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal,

---

<sup>2</sup> Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta Sinar Grafika, 2001), h.139-142

saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal).

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penggolongan ahli waris. Jika tidak ada keempat golongan tersebut maka harta peninggalan jatuh pada Negara, golongan yang terdahulu menutup golongan yang kemudian jadi jika ada ahli waris golongan I maka ahli waris golongan II, III dan IV tidak menjadi ahli waris, jika golongan I tidak ada maka golongan II yang mewarisi dan golongan III dan IV tidak mewarisi, dalam golongan I termasuk anak-anak sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan perbedaan umur, apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri atau juga saudara-saudara maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 859 warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama itu berupa satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas dan satu bagian lagi untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu (Pasal 853).<sup>3</sup>

Asas hukum waris antara lain : Golongan ahli waris terdekat menutup golongan ahli waris terjauh kecuali ada kloting, Derajat keluarga terdekat tidak pasti menutup derajat keluarga terjauh, Hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda yang dapat diwariskan, Apabila seseorang meninggal maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta PT RajaGrafindo Persada), h. 35-36

<sup>4</sup> Istiqamah, *Hukum Perdata di Indonesia* (Makassar Alauddin University Press, 2011), h.

Orang orang yang boleh mendapat harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan; Anak laki-laki dari yang meninggal, Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki-laki dan terus ke bawah asal pertaliannya masih terus laki-laki, Bapak dari yang meninggal, Datuk (kakek) dari pihak bapak dan terus ke atas pertalian yang belum putus dari pihak bapak, Saudara laki-laki seibu-sebapak, Saudara laki-laki bapak saja, Saudara laki-laki seibu saja, Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak, Anak laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu-sebapak, Saudara laki-laki bapak yang sebapak saja, Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu sebapak, Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang sebapak saja, Suami, Laki-laki yang memerdekakan mayat. Jika 15 orang tersebut di atas semua ada maka yang mendapat harta warisan dari mereka itu hanya 3 orang saja yaitu, bapak, anak laki-laki, Suami. Sedangkan dari pihak perempuan, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah asal pertalianya dengan yang meninggal masih terus laki-laki, ibu, Ibu dari bapak, ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki, Saudara perempuan yang seibu-sebapak, Saudara perempuan yang sebapak, Saudara perempuan yang seibu, Istri, Perempuan yang memerdekakan mayat. Jika 10 orang tersebut di atas ada semuanya maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja yaitu; istri, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, Ibu, Saudara perempuan yang seibu-sebapak.

sekiranya 25 orang tersebut diatas dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan semua ada maka yang tetap pasti mmendapat hanya salah seorang dari dua laki-istri, ibu dana bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Anak yang dalam kandungan ibunya juga mendapat harta warisan dari keluarganya yang meninggal dunia sewaktu dia masih dalam kandungan ibunya.<sup>5</sup>

ثَافَلَهُنَّ أَتْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنْ أَلْأُنثَيَيْنِ حَظٌّ مِثْلُ الَّذِي كَرَأُولَدٍ كُمْ فِي اللَّهِ يُوصِيكُمْ  
نَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ بَوَيَّةِ النِّصْفِ فَلَهَا وَاحِدَةٌ كَانَتْ وَان تَرَكَ مَاثَلُ  
وَلَدَهُ

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta.<sup>6</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas Balai Harta Peninggalan mengenai pengurusan harta peninggalan dalam kasus penanganan anak. ?
2. Bagaimana cara pembagian Harta warisan. ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta dalam kasus penanganan anak. ?

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung Cv Sinar Baru, 1987), h. 326-327

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 20

### C. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian

#### a. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka penulis dapat di jelaskan definisi satu persatu dari judul draft skripsi ini. Adapun istilah yang digunakan, yaitu:

1. Eksistensi : Yaitu segala sesuatu yang di alami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada.<sup>7</sup>
2. Balai Harta : Yaitu suatu unit pelaksana teknis dalam penanganan hartapeninggalan yang tidak terurus dan surat keterangan waris.<sup>8</sup>
3. Peninggalan : Yaitu segala sesuatu yang di tinggalkan pewaris berupa harta atau uang.<sup>9</sup>
4. Penanganan : Proses atau cara perbuatan untuk menanganinya.<sup>10</sup>
5. Kasus : Keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara
6. Kewarisan : Orang berhak menerima pusaka atau harta peninggalan.
7. Anak : Adalah orang yang dilahirkan dari perkawinan seorang perempuan dan laki-laki dengan tidak menyangkut

---

<sup>7</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk pelajar* (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2011), h. 321.

<sup>8</sup>Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2011), h. 159

<sup>9</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk pelajar* (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2011), h. 114.

<sup>10</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk pelajar* (Jakarta Timur: Balai Pustaka 2011), h. 232.

bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.<sup>11</sup>

b. Fokus penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Balai Harta Peninggalan Makassar. Judul skripsi ini, mengembangkan sejauh mana peran dan penetapan Balai Harta Peninggalan Makassar dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan hukum surat keterangan hak waris dalam penanganan kasus kewarisan anak, serta menjelaskan tanggung jawab Balai Harta Peninggalan atas surat keterangan hak waris yang di buat

**D. Kajian Pustaka**

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut di antaranya:

Supomo, Dalam bukunya *Hukum waris Indonesia*. mengatakan bahwa hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan hukum waris pada dasarnya sangat berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia dimuka bumi ini pastinya akan mengalami peristiwa hukum yang di namakan kematian. Hukum Waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan secara menoperkan barang-barang yang tidak

---

<sup>11</sup> Djakaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surakarta Pustaka Mandiri, 2003), h 169-320-16

berwujud benda, *Immaterielle Gorderen*, dari suatu angkatan manusia, *Generatie*, kepada turunannya.<sup>12</sup>

Soerojo Wignyodipoera, dalam bukunya *Hukum Kewarisan* :. Menjelaskan bahwa hukum waris adalah serangkaian norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat cara dan proses peralihannya dan meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerus atau pengoperan serta peralihan atau perpindahan harta kekayaan materil dan immateril dari generasi ke generasi

Sudarsono, dalam bukunya *Hukum Waris di Indonesia: Dalam Perspektif Islam*. Menjelaskan bahwa hukum waris sebagai soal apakah dan bagaimanaka berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup, dalam kata lain hukum waris dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan***

##### **a. Tujuan:**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana tugas Balai Harta Peninggalan mengenai pengurusan harta peninggalan dalam kasus penanganan anak.

---

<sup>12</sup>Eman Suparman, *Pengertian Hukum Waris* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 43.



2. Mengetahuibagaimanacara pembagaian harta warisan.
3. Mengetahuibagaimanapandangan hukum Islam terhadapkewarisan dalam kasus penanganan anak.

b. Kegunaan:

1. Kegunaanteoritis

Secarateoretispenulisskripsiinidiharapkandapatmenambahpengetahuan yang dapatdipergunakandandimanfaatkandidalampenulisanbidangilmu hukum perdatahususnyapenyelesaiankasuskewarisan dalam penanganan anak danjugadiharapkanbahwasilpenelitianinidapatmemberikanmanfaatbagiperkembanganilmupengetahuankhususnyailmupengetahuantentangpembagian harta warisan dalam kasus penanganan anak.

2. Kegunaanpraktis

- a. DapatmemberikaninformasidanmengetahuitentangperananBalai Harta Peninggalan Makassardalammenetapkan pembagian warisan, sertahambatan-hambatan yang ditemui di Balai Harta Peninggalan dalammengungkapdanmenetapkanadanyahak waris kepada anak.
- b. Dapatmemberikansumbanganpemikiranpadapihak yang terkaitdalammenanganipembagian harta warisan dalam kasus penangananana anak.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN

##### 1. Pengertian kewarisan

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan islam, seperti *Fiqhi Mawaris*, ilmu *Faraidh* dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. *Fiqhi mawaris* adalah kata yang berasal dari bahasa arab *Fiqh* dan *Mawaris* menurut bahasa. *Fiqh* adalah pengetahuan dan paham, menurut istilah *Fiqh* ialah ilmu untuk mengetahui hukum hukum syara' sedangkan kata *Mawaris* adalah harta warisan atau peninggalan mayit jadi *Fiqh Mawaris* adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan dan siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing. Sedangkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia digunakan kata waris, warisan, dan hukum kewarisan kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah menerima. Adapun yang kata warisan berarti sesuatu yang diwariskan seperti harta. Nama baik harta pusaka sedangkan kata kewarisan dengan mengambil kata asal waris dan tambahan awal "ke" dan akhiran "an" arti kata "kewarisan" itu sendiri yakni hal yang berhubungan dengan waris atau warisan. Jadi hukum kewarisan ialah hukum yang berhubungan

dengan waris dan warisan.<sup>1</sup> Sedangkan didalam kompilasi hukum Islam yakni pasal 171 poin (a) menjelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris. Menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum Islam mengenai hukum kewarisan Islam. Antara lain:

- a. Menurut Drs. Fatchur Rahman. Hukum Kewarisan Islam ialah aturan-aturan yang tidak mengandung unsur sewenang-wenang terhadap para ahli waris. Bahkan telah memperbaiki kepincangan-kepincangan sistem pusaka mempusakai yang telah dijalankan oleh orang-orang terdahulu dan oleh sebagian orang-orang sekarang, menurut beliau, hukum kewarisan Islam mengandung unsur-unsur keadilan yang mutlak.
- b. Menurut Prof Dr. Amir Syarifuddin. Hukum kewarisan Islam adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini selaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.
- c. Menurut Drs. H. Habiburrahman, M.Hum. Hukum kewarisan Islam adalah hukum waris yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits yang berlaku universal di bumi maupun di dunia ini.

---

<sup>1</sup>Muhammad Ali Ash-shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 33

Dari uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah seperangkat peraturan yang berpedoman kepemilikan harta si pewaris kepada ahli warisnya yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits yang diberlakukan kepada seluruh masyarakat Islam di Indonesia.<sup>2</sup>

## 2. Syarat dan Rukun Waris

Pada dasarnya persoalan waris mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda. Hak dan tanggung jawab pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *Ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa di gantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Pengertian tersebut akan terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun. Akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri. Dalam hal ini menemukan tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh Ulama, tiga syarat tersebut adalah:

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya di anggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.

---

<sup>2</sup>Dian Khairul Umum, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 11

c. Seluruh ahli waris di ketahui secara pasti baik bagian masing-masing.<sup>3</sup>

Adapun rukun waris yang harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan dalam hukum kewarisan islam di ketahui tiga macam yaitu:

a. Muwaris yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benar-benar telah meninggal dunia. Kematian muwaris itu, menurut Ulama dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

1. Mati *Haqiqy* (mati sejati)

Mati *Haqiqy* (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan Hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

2. Mati *Hukmy* (mati menurut Hakim atau yuridis)

Mati *Hukmy* (mati menurut Hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan Hakim secara yuridis muwaris dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut Malkiyyah dan Hambaliyah apabila apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama empat tahun sudah dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama lain,

---

<sup>3</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet, II, 1995), h. 13

terserah kepada ijthad Hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.<sup>4</sup>

### 3. Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan)

Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras. Misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa meminum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati. Maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

- b. Waris (ahli waris) yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*Al-Haml*) terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
- c. *Maurus* atau *al-miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan Jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h. 39

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 17

## **B. TINJAUAN UMUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN**

### **1. Rukun Waris**

Menurut bahasa, rukun ialah asas atau dasar. Sedangkan menurut istilah rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Jadi, rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga, yaitu:

- a. Al Muwarrits (yang mewariskan) adalah orang yang harta peninggalannya pindah ke tangan orang lain (ahli warisnya). Dan ia adalah si Mayit
- b. Al- Warits (ahli waris) adalah orang yang menerima harta peninggalan si mayit
- c. Al- Mauruts (yang diwariskan) yaitu harta peninggalan (si Mayit)

bagian-bagian ahli waris.<sup>6</sup>

Harta waris dibagikan jika memang orang yang telah mati itu meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terdahulu mesti dikeluarkan, yaitu:

- a. segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman Jenazah.
- b. Wasiat dari orang yang meninggal.

---

<sup>6</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997), h. 36

- c. Hutang plutang sang Mayit. Ketika tiga hal ini telah terpenuhi barulah pembagian harta waris di berikan kepada keluarga dan juga para kerabat yang berhak.

Adapun kriteria ahli waris tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c, yang berbunyi “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Apabila dicermati hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu; Ahli waris Nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena ada hubungan darah, maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris. Sedangkan Ahli waris Sahabiyah yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu seperti perkawinan yang sah dan memerdekakan hamba sahaya atau karena perjanjian tolong menolong.<sup>7</sup>

Macam- macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari jenis kelaminnya. Dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terdiri dari dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Sedangkan ditinjau dari segi hak

---

<sup>7</sup>Muhammad Thoha Abu Eka Khalifah, *Hukum Waris*, (Bandung: Tiga Serangkai, 2007), h. 6



atas harta warisan maka ahli waris terdiri dari tiga golongan yaitu *Al-dzawil Furudl*, *Ashabah*, dan *Dzawil Arham*. Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat di jabarkan sebagai berikut pembagian harta warisan dalam Islam telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa secara gamblang dan dapat di simpulkan bahwa ada enam tipe persentase pembagian harta waris yaitu ada dipihak yang mendapatkan setengah ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ) seperdelapan ( $1/8$ ), dua pertiga ( $2/3$ ), dan seperenam ( $1/6$ ).

- a. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan sepenuh( $1/2$ ) yaitu, seorang suami yang ditinggalkan istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini atau anak tiri. Seorang anak kandung perempuan dengan dua syarat yaitu pewaris tidak memiliki anak laki-laki dan anak tersebut merupakan anak tunggal. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan tiga syarat yaitu apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal dan apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan. Saudara kandung perempuan dengan syarat ia hanya seorang diri tidak memiliki saudara lain baik perempuan maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki

ayah atau kakek ataupun keturunan baik laki-laki maupun perempuan. Saudara perempuan se ayah dengan syarat apabila ia tidak mempunyai saudara hanya seorang diri pewaris tidak memiliki saudara kandung naik perempuan maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan keturunan.<sup>8</sup>

- b. Pembagian harta waris dalam islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan seperempat ( $1/4$ ) yaitu seorang suami yang ditinggal oleh istrinya dan begitu pula sebaliknya. Seorang suami ditinggalkan dengan syarat istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-lakinya tidak peduli apakah cucu tersebut darah dagingnya atau bukan. Seorang istri yang di tinggalkan dengan syarat suami tidak memiliki anak atau cucu tidak peduli anak terebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan.
- c. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperdelapan ( $1/8$ ) yaitu istri yang ditinggalkan suaminya yang mempunyai anak atau cucu baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.
- d. Pembagian harta waris dalam islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris dua pertiga ( $2/3$ ). Dua orang anak kandung perempuan atau lebih dimana dia tidak

---

<sup>8</sup>Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 30-31

memiliki saudara laki-laki atau anak laki-laki dari pewaris. Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung dan dua cucu tersebut tidak memiliki saudara laki-laki. Dua saudara kandung perempuan atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek dan dua saudara perempuan kandung tersebut tidak memiliki saudara laki-laki. Dua saudara perempuan seayah atau lebih dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak ayah atau kakek ahli waris yang dimaksud tidak memiliki saudara kandung.

- e. Pembagian harta warisan dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris sepertiga. Seorang ibu dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dan keturunan anak laki-laki pewaris tidak memiliki dua atau lebih saudara kandung atau bukan. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu dua orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak ayah atau kakek dan jumlah saudara seibu tersebut dua orang atau lebih.<sup>9</sup>

## 2. Sebab- sebab orang mendapatkan warisan

---

<sup>9</sup>Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), h 33

Seseorang berhak mendapatkan sejumlah harta warisan apabila terdapat salah satu sebab seperti:., kekeluargaan, perkawinan, karena memerdekakan budak, hubungan Islam orang yang meninggal dunia apabila tidak mempunyai ahli waris maka harta peninggalannya diserahkan ke Baitul Mal untuk Islam dengan jalan pusaka.

### 3 Sebab-sebab orang tidak mendapatkan warisan

- a. Hamba, seorang hamba tidak mendapat warisan dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba.
- b. Pembunuh, seorang pembunuh tidak memperoleh warisan dari orang yang di bunuhnya Rasulullah Saw berkata, *yang membunuh tidak mewarisi satupun dari yang dibunuhnya.*
- c. Murtad, orang yang murtad tidak mendapat warisan dari keluarganya yang masih beragama Islam
- d. Orang non muslim, orang non muslim tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam dan begitu pula sebaliknya orang muslim tidak berhak menerima harta warisan dari orang non muslim atau kafir.

### 4. Pewaris Pengganti

Perihal pewaris pengganti, KHI mengaturnya dalam Pasal 185 yaitu, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digunakan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam pasal

173. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sederajat dan yang diganti.<sup>10</sup>

## 5. Dasar hukum waris

Dasar hukum waris terdapat dalam beberapa sumber hukum Islam di antaranya:

- a. Al-Qur'an bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang kuat yaitu ayat-ayat al-Qur'an selain kedudukannya *Qath'i Al-Warud*, juga *Qath'i Al dalalah* meskipun pada dataran *Tanfiz* (aplikasi) sering ketentuan baku al-Qur'an tentang bagian-bagian waris mengalami perubahan pada bagian nominalnya misalnya kasus *radd 'aul* dan sebagainya.

Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan dapat di jumpai dalam beberapa surat dan ayat sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 33 yang menyatakan adanya hak bagi ahli waris dari setiap harta peninggalan:

تَوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ الْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا مَوَالِي جَعَلْنَا وَلِكُلِّ  
أَشْيَاءٍ كُلِّ عَلَى كَانَ اللَّهُ إِنْ نَصِيهِمْ فَعَاتُوهُمْ أَيْمَنُكُمْ عَقَدَ

شَهِيد

Terjemahnya:

*bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang di tinggalkan ibu bapak dari karib atau kerabat kami jadikan pewaris-pewarisnya dan jika ada orang-orang yang kamu*

<sup>10</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007). h. 39-40.

*telah bersumpah setia dengan mereka maka berilah mereka bagiannya”.*(Q.S. Al-Nisa’:33)

2. Al-Qur’an syarat an-Nisa’ ayat 7 menyatakan bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan, masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan bagian yang ditentukan

مِمَّا نَصِيبٌ لِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ  
مَفْرُوضًا نَصِيبًا كَثْرًا أَوْ مِثْلًا مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ

Terjemahnya:

*bagi orang laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada haknya bagian(pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan”.* (QS. An-Nisa’: 7).<sup>11</sup>

3. Ayat yang menerangkan secara rinci ketentuan bagi ahli waris (*furud al-muqoddoh*).

4. Ayat yang menegaskan pelaksanaan ketentuan ayat-ayat waris bahwa bagi orang yang melaksanakan akan dimaksudkan surga selamanya dan bagi orang yang sengaja mendurhakai hukum Allah maka bagi mereka mendapat siksa di Neraka.

#### b. Al-Hadits

Selain Al-Qur’an hukum kewarisan juga di dasarkan kepada hadits Rasulullah SAW. Adapun hadits yang berhubungan dengan hukum kewarisan di antaranya:

<sup>11</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*(Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 45

Hadits Nabi dari Ibnu Abbas riwayat Bukhari Muslim.....

فَوَقَّ نِسَاءً كُلَّ فَإِنَّ الْأُنثَى حَظٌّ مِثْلُ الذَّكَرِ أَوْلَدَكُمْ فِي اللَّهِ يُوصِيكُمْ  
الْأُنْثَى فَلَهَا وَاحِدَةٌ كَانَتْ وَإِنْ تَرَكَ مَا تَلْنَا فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ

Artinya:

*Allah mensyariatkan bagimu tentang [pembagian pusaka untuk] anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.*

c. Ijma dan ijtihad

Ijma' dan ijtihad para sahabat, Imam-imam madzhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash sharih, ijma dan ijtihad adalah menerima hukum warisan sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan masyarakat dan menjawab persoalan yang muncul dalam pembagian warisan yaitu dengan cara menerapkan hukum, bukan mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada.<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ashidueqy, *Fiqh Muwaris* (Semarang: Pustaka Putra, 1999), h. 9

### C. KEWAJIBAN AHLI WARIS TERADAP HARTA PENINGGALAN

Menurut jumhur Fuqoha dan ketentuan yang termuat dalam Pasal 175 ayat (1) kompilasi Hukum Islam terhadap peninggalan pewaris tersebut melekat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris sebelum di adakan pembagian harta warisan yaitu:

1. Biaya pengrusan Jenazah atau tajhiz, yang disebut tajhiz ialah biaya-biaya perawatan yang diperlukan orang yang meninggal, mulai dari saat meninggalnya sampai saat penguburannya. Biaya itu mencakup biaya-biaya untuk memandikannya mengkafani, mengusung dan menguburkannya. Besar biaya tersebut diselesaikan secara wajar dan makruf tidak boleh terlalu kurang dan tidak boleh berlebihan. Para fuqaha telah sepakat bahwa perawatan pewaris harus diambilkan dari harta peninggalannya. Apabila harta peninggalannya tidak mencukupi biaya tersebut para ulama berbeda pendapat, ulama Hanafiyah Syafi'iyah dan hanabilah mengatakan bahwa kewajiban menanggung biaya perawatan tersebut terbatas keluarga yang semasa hidupnya di tanggung oleh si mati, karena merekalah yang telah menikmati hasil jerih payah si mati maka sangat wajar apabila mereka yang diberi tanggung jawab memelihara Jenazah orang yang berjazah pada mereka. Kalau si mati tidak mempunyai kerabat diambilkan dari *bait Al-mad* dan kalau dari *bait Al-mal* pun tidak memungkinkan maka biaya perawatannya dibebankan kepada orang Islam yang kaya sebagai pemenuhan kewajiban Fardu Kifayah.



Fuqaha aliran makiyyah berpendapat bahwa biaya perawatannya harus di ambilkan *bait al mal* atau kas perbedaan negara, karena keadaan yang semacam itu menjadi kewajiban *bait al-mal*. Pendapat mayoritas ulama kiranya patut di pedomi karena keluargalah yang sebaiknya bertanggung jawab menyelesaikan persoalan pewaris, apakah meninggalkan harta, maka sudah sepantasnya mereka pula bertanggung jawab mengurus segala sesuatunya.

2. Pelunasan hutang, adalah sautu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan darprestasiyang pernah diterima oleh seseorang. Apabila seseorang yang meninggalkan hutang pada orang lain belum di bayar maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi dari harta peninggalannya sebelum harta dibagikan kepada ahli waris. Demikian didahulukan kata wasiat dari pada hendaknya untuk memberi motivasi agar orang yang akan meninggal hendaknya melakukan wasiat pada sebagian hartanya untuk itu utang tetap di dahulukan dari pada wasiatnya.
3. Pelaksanaan wasiat, setelah menggunakan harta peninggalan yang meninggal untuk mengurus dan membayar utang. Langkah selanjutnya adalah untuk melaksanakan wasiat selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara', wasiat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela atau tabarru yang pelaksananya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan hak sesuatu baik sesuatu berupa barang maupun manfaat. Jumlahnya tidak boleh dari sepertiga harta. Setelah semua hal yang bersangkutan dengan harta pusaka tersebut

dilaksanakan maka harta peninggalan yang ada dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.<sup>13</sup>

#### **D. AHLI WARIS DAN BAGIAN-BAGIANNYA**

##### **1. Ahli Waris**

Jumlah keseluruhan ahli waris yang secara hukum berhak menerima warisan ada 17 orang terdiri 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Apabila di rinci semuanya ada 25 orang. 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Dari jenis kelamin laki-laki adalah : anak laki-laki, cucu laki-laki dan anak laki-laki, ke bawah, bapak, kakek hingga ke atas, saudara sekandung, saudara seapak, saudara seibu, anak laki-laki dari saudara seapak, paman sekandung, paman seapak, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seapak, suami dan seorang laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya(*Mu'tiq*).

Sedangkan ahli waris dari jenis kelamin perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak bapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu, istri dan perempuan yang memerdekakan hamba sahaya(*Mu'tiqoh*)<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 35

<sup>14</sup> Asyuni A. Rahman, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1986) , h.34

## 2. Macam- macam ahli waris

Berdasarkan tiga penyebab mewarisi yang di sepakati Ulama Fikih, maka ahli waris dapat di bagi tiga macam.

- a. Ahli Waris karena hubungan perkawinan (*Subabiyah*), adalah ahli waris yang berhubungan pewarisnya timbul karena hubungan perkawinan.
- b. Ahli Waris karena hubungan keturunan (*Nusabiyah*) atau kekerabatan (*Gharibah*) adalah waris yang pertalian kekerabatannya kepada muwaris berdasarkan hubungan darah. Ahli waris *Nasabiyah*. Dari ahli waris *Nasabiyah* tersebut dapat di kelompokkan berdasarkan tingkatan kerabatnya sebagai berikut.
  1. *Furu 'Al-waris*, yaitu ahli waris anak keturunan si mati, atau tersebut kelompok cabang (*al-bunuwwah*). Kelompok inilah yang terdekat, dan mereka yang didahulukan menerima warisan. Ahli waris kelompok ini adalah: anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, anak laki-laki dan cucu laki-laki garis laki-laki.
  2. *Ushul Al-waris*, yaitu ahli waris leluhur si mati. Kedudukannya berada setelah kelompok *furu 'al-waris*. Mereka adalah bapak ibu kakek garis bapak, kakek garis ibu, nenek garis ibu dan nenek garis bapak.
  3. *Al- Hawasy*, yaitu ahli waris kelompok saudara termasuk didalamnya paman dan keturunan seluruhnya ada 12 orang.

Yaitu : saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak saudara laki-laki sekandung, maka saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak paman sekandung dan anak paman seayah.<sup>15</sup>

- c. Ahli waris karena membebaskan hamba sahaya (*wala'*), yaitu ahli waris yang hubungan pewarisnya timbul karena memerdekakan hamba sahaya. Ahli waris *wala'* hanya satu, yaitu mantan tuan (yang memerdekakan) bukan ahli waris bagi mantan tuannya. Jika di lihat dari segi bagian-bagiannya yang di terima dapat di bedakan kepada.
  1. Ahli waris *ashab-Al-furud*, yaitu orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah di tentukan dengan nash al-Qur'an al-sunnah atau al-Ijma.
  2. Ahli waris *Ashabah*, yaitu waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada waris *Ashab al-furud*. Sebagai penerima bagian sisa, ahli waris *ashabah*, terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima sedikit, tetapi terkadang menerima sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena habis diambil ahli waris *ashab Al-furud*.

---

<sup>15</sup>Budiono Rachmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 74

3. Ahli waris *Zawi Al-arham*, yaitu orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal tetapi mereka tidak termasuk ke dalam golongan *azhab-Al furud* dan tidak pula ke dalam golongan *ashabah*.

### 3. Bagian bagian ahli waris

Masing-masing ahli waris mempunyai bagian yang berbeda-beda, keadaan ini dipengaruhi oleh jumlah ahli waris ada. Adapun perincian bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Anak perempuan, berhak menerima bagian :
  - $\frac{1}{2}$  jika sendirian tidak bersama laki-laki
  - $\frac{2}{3}$  jika dua orang anak atau lebih tidak dengan anak laki-laki
- b. Cucu perempuan, berhak menerima bagian
  - $\frac{1}{2}$  jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak *mahjub* (terhalang)
  - $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki
  - $\frac{1}{6}$  sebagai pelengkap  $\frac{2}{3}$  jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak *mahjub*, jika anak perempuan dua orang atau lebih ia tidak mendapat bagian.
- c. Ibu berhak mendapat bagian
  - $\frac{1}{3}$  jika tidak ada anak atau cucu (*for'u waris*) atau saudara dua orang atau lebih

- $\frac{1}{6}$  jika ada *for'u waris* atau bersama dua orang saudara atau lebih

d. Bapak berhak mendapat bagian:

- $\frac{1}{6}$  jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki.
- $\frac{1}{6}$  + sisa, jika bersamamu satu perempuan atau cucu perempuan, jika bapak bersama ibu.
- Masing-masing  $\frac{1}{6}$  jika ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.
- $\frac{1}{3}$  untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika ada anak, cucu atau saudara dua orang lebih.
- Ibu menerima  $\frac{1}{3}$  sisa, bapak sisanya setelah di ambil suami atau isteri.

e. Nenek, jika tidak *mahjub* berhak menerima bagian :

- $\frac{1}{6}$  jika seorang
- $\frac{1}{6}$  di bagi rata, apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.

f. Kakek, jika tidak *mahjud* berhak menerima bagian :

- $\frac{1}{6}$  jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki
- $\frac{1}{6}$  + sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki
- $\frac{1}{6}$  atau muqasamah (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah di ambil untuk ahli waris lain.

- $\frac{1}{6}$  atau muqasamah (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah , setelah di ambil untuk ahli waris lain
  - $\frac{1}{3}$  atau muqamah bersama saudara sekandung atau seayah jika tidak ada ahli waris lain.
- g. Saudara perempuan sekandung, jika tidak *mahjub*, berhak menerima bagian :
- $\frac{1}{2}$  jika seorang, dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung
  - $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
- h. Saudara perempuan seayah, jika tidak *muhjub*, berhak menerima bagian :
- $\frac{1}{2}$  seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah
  - $\frac{2}{3}$  dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah
  - $\frac{1}{6}$  jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang sebagai pelengkap  $\frac{2}{3}$
- i. Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama apabial tidak *mahjud*, saudara seibu berhak menerima bagian :
- $\frac{1}{6}$  jika seorang diri
  - $\frac{1}{3}$  dua orang atau lebih

- Bergabung menerima  $\frac{1}{3}$  dengan saudara sekandung, ketika bersama-sama dengan ahli waris suami dan ibu (musyarakah)
- j. Suami, berhak menerima bagian
  - $\frac{1}{2}$  jika tidak mempunyai anak atau cucu
  - $\frac{1}{4}$  jika bersama dengan anak atau cucu
- k. Isteri, berhak menerima bagian
  - $\frac{1}{4}$  jika tidak mempunyai anak atau cucu
  - $\frac{1}{8}$  jika bersama anak atau cucu

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Islam mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup dengan tidak membedakan besar kecilnya bagian-bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhan dan tanggung jawab yang dipikul, disamping memandang jauh dekatnya hubungan dengan pewaris.<sup>16</sup>

#### ***E. TINJAUAN TENTANG BALAI PENINGGALAN HARTA (BPH)***

Balai Harta Peninggalan pada awal pembentukannya diawali masuknya Hindia Belanda ke Indonesia Tahun 1596 sebagai pedagang. Dengan semakin banyaknya bangsa Belanda dan menghasilkan harta atau kekayaan, maka guna mengurus harta-harta tersebut untuk kepentingan para ahli warisnya di Nederland yang orang tuanya mati dalam peperangan, maka dibentuk Lembaga yang diberi nama West En Boedel

---

<sup>16</sup>Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group 2008), h.



Kamer (Balai Harta Peninggalan) pada tanggal 1 Oktober 1624 berkedudukan di Jakarta.

Seiring berkembangnya dan perubahan sistem Hukum di Indonesia tahun 1987 semua perwakilan Balai Harta Peninggalan (BHP) di seluruh Indonesia dihapuskan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987. Saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu : Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar dan masing-masing meliputi wilayah kerja daerah tingkat I dan tingkat II. Untuk Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, mempunyai 8 (delapan) wilayah kerja meliputi : DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi dan Kalimantan Barat.

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 1 Maret 2005 Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BHP merupakan Unit Pelaksana Teknis berada di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata.

### 1. Visi BHP

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Balai Harta Peninggalan memiliki Visi :

“Memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya yang oleh hukum dan penetapan pengadilan dianggap tidak cakap bertindak di bidang hak milik”.

### 2. Misi BHP

Berdasarkan Visi tersebut di atas, Misi Balai Harta Peninggalan adalah :

”Mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

### 3. Tugas dan kewajiban BHP

Dalam melaksanakan tugas/misinya tersebut, Balai Harta Peninggalan sebagaimana ditetapkan dalam Bab I pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tanggal 19 Juni 1980 (tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi BHP), mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam Perundang-undangan;

- b. Melaksanakan penyelesaian pembukaan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- c. Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

#### 4. Fungsi BHP

Adapun kebijakan operasional / tugas pokok Balai Harta Peninggalan dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Pengampu atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 KUH Perdata);
- b. Pengurus atas diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang masih belum dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali (Pasal 359 ayat terakhir KUH Perdata) ;
- c. Sebagai wali pengawas (Pasal 366 KUH Perdata) ;
- d. Mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal adanya pertentangan dengan kepentingan wali (Pasal 370 KUH Perdata) ;
- e. Mengurus harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 338 KUH Perdata) ;
- f. Pengurusan harta peninggalan yang tak ada kuasanya / onbeheerde nalatenschappen (pasal 1126, 1127 dan 1128 KUH Perdata) ;
- g. Pengurusan budel-budel dari orang-orang yang tidak hadir atau Boedels Van Afwezigen (Pasal 463 BW) ;
- h. Pengurusan budel-budel dari orang-orang yang berada dibawah pengampuan karena sakit jiwa atau pemboros. Dalam hal ini B.H.P.

bertugas selaku pengampu pengawas (Pasal 449 KUH Perdata), akan tetapi bila pengurusan dicabut dari pengampunya, langsung menjadi pengurus harta kekayaan orang yang berada dibawah pengampuan (pasal 452 jo. pasal 338 KUH Perdata) ;

- i. Menyelesaikan boedel kepailitan (Pasal 70 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004) ;
- j. Mendaftar dan membuka surat-surat wasiat (Pasal 41, 42 OV dan Pasal 937, 942 KUH Perdata) ;
- k. Membuat surat keterangan waris bagi golongan Timur Asing selain Cina (Pasal 14 ayat 1 Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stbl. 1916 No. 517);
- l. Melakukan pemecahan dan pembagian waris (Pasal 1071 KUH Perdata) ;
- m. Melakukan pengelolaan dan pengembangan Uang Pihak Ketiga berdasarkan Keputusan Menteri Hukum & HAM ;
- n. Melakukan penerimaan dan pengelolaan hasil Transfer Dana dari Bank (Pasal 37 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2011 jo. Pasal 17 ayat (4) dan (5), Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No. 14/23/PBI/2012) ;
- o. Melakukan penerimaan dan pengelolaan dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Pasal 22 ayat (3a) dan Pasal 26 ayat (5) PP No. 53 Tahun 2012 jo. Peraturan Menkumham No. 13 Tahun 2013).

5. Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sehubungan dengan kewarisan berdasarkan beberapa Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Guna sebagai Pengurusan harta peninggalan yang tak ada kuasanya atau Onbeheerde Nalatenschappen , Bila pada waktu terbukanya suatu warisan tidak ada orang yang muncul menuntut haknya atas warisan itu, atau bila ahli waris yang dikenal menolak warisan itu, maka harta peninggalan itu dianggap tidak terurus. Balai Harta Peninggalan, menurut hukum wajib mengurus setiap harta peninggalan tak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi utang pewarisnya. Balai itu, pada waktu mulai melaksanakan pengurusan, wajib memberitahukan hal itu kepada jawatan Kejaksaan pada Pengadilan Negeri. Dalam hal ada perselisihan tentang terurus tidaknya suatu harta peninggalan. Pengadilan itu atas permohonan orang yang berkepentingan atau atas saran jawatan Kejaksaan, setelah minta nasihat, Balai Harta Peninggalan akan mengambil keputusan tanpa persidangan. . Balai Harta Peninggalan setelah mengadakan penyegelan yang dianggap perlu, wajib untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan itu, dan mengurusnya serta membereskannya. Balai itu wajib untuk melacak para ahli waris, dengan cara memasang panggilan melalui surat kabar resmi, atau dengan cara lain yang lebih tepat. Balai itu

harus bertindak dalam Pengadilan mengenai tuntutan-tuntutan hukum yang telah diajukan terhadap harta peninggalan itu, dan menjalankan serta melanjutkan hak-hak dari orang yang telah meninggal itu, dan memberikan perhitungan mengenai pengurusannya kepada orang yang seharusnya melakukan perhitungan itu.

2. Membuat surat keterangan waris, Balai Harta Peninggalan (BHP) mempunyai tugas bagi golongan Timur Asing selain Cina, (Surat Mahkamah Agung No. MA/kumdil/171/V/K/1991)
3. Membuka Surat wasiat olografis yang tertutup ,Setelah pewaris meninggal dunia, Notaris harus menyampaikan wasiat rahasia atau tertutup itu kepada Balai Harta Peninggalan yang dalam daerahnya warisan itu terbuka; balai ini harus membuka wasiat itu dan membuat berita acara tentang penyampaian dan pembukaan wasiat itu serta tentang keadaannya, dan kemudian menyampailkannya kembali kepada Notaris yang telah memberikannya.
4. Membuka Surat Wasiat Yang tertutup, Setelah pewaris meninggal dunia, Notaris harus menyampaikan wasiat rahasia atau tertutup itu kepada Balai Harta Peninggalan yang dalam daerahnya warisan itu terbuka; balai ini harus membuka wasiat itu dan membuat berita acara tentang penyampaian dan pembukaan wasiat itu serta tentang keadaannya, dan kemudian menyampailkannya kembali kepada Notaris yang telah memberikannya.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### **A. Jenis Dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Selain itu, juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Adapun lokasi penelitian adalah Balai Peninggalan Harta (BPH) Makassar.

##### **B. Pendekatan penelitian**

Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif (hukum positif) dan yuridis empiris, pendekatan yang meninjau dan menganalisis masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui library research. Penelitian ini menekankan segi-segi yuridis, dengan melihat pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya.

##### **C. Sumber data**

Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan sekunder.

- a. *Data primer* merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan di

Balai Peninggalan Harta (BPH) Makassar dengan cara-caraseperti interview

yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara adantanya jawab padainforman penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan didukung oleh data-data kuantitatif.

- b. *Data sekunder* merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan.

Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisis permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *Library research* dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

Metode ini menggunakan dua kutipan sebagai berikut:

1) Kutipan Langsung

Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikit pun merubah susunan redaksinya.

2) Kutipan Tidak Langsung



Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikannya ke dalam susunan redaksi yang baru, tanpa sedikit pun merubah susunan redaksinya, mengutip pendapat orang lain dengan cara meringkasnya tetapi inti dari pendapat tersebut tetap sama.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>1</sup>
2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisanya berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang monumental yang bersangkutan.
3. Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingka

---

<sup>1</sup>Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian*, h. 46.

hlakudenganmelihatataumengamatiindividuataukelompoksecaralangsung.<sup>2</sup>

4. Triangulasi (gabungan) adalahsebagaiteknikpengumpulan data yang bersifatmenggabungkandariberbagaiteknikpengumpulan data dansumber data yang telahada.<sup>3</sup>

Penelitianini, menggunakanprosedurpenelitiansebagaiberikut: KegiatanpenelitianinidimulaidenganmemperolehizinpenelitiandariFakultasSyariahdanHukumUniversitas Islam NegeriAlauddin Makassar, kemudiansurattersebutditeruskankekanorGubernur Sulawesi Selatan padabagianBalitbangda, laluditeruskankekanorWalikota Makassar sesuailokasimendapatkansuratizinpenelitiandiBalai Peninggalan Harta (BPH) di Makassar.

#### **E. InstrumenPenelitian**

Instrumenataualatpenelitiadalahpenelitiitusendiri.Olehkarenaitupenelitisebagaiinstrumenjugaharus “divalidasi” seberapajauhpenelitiankualitatifsiapmelakukanpeneliti yang selanjutnyaterjungkelapangan. Adapunalat-alat yang harusdisiapkanolehpenelitiuntukmenelitiadalahsebagaiberikut:

1. Pedomanwawancaraadalahalat yang digunakandalammelakukanwawancara yang

<sup>2</sup>HadiSutrisno, *MetodologiPenelitian* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1986), h. 172.

<sup>3</sup>BambangSugiono, *MetodePenelitianHukum*, h. 225-242.

dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berwujud daftar pertanyaan.

2. Buku catat dan alat tulis:

berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.

3. Tape recorder

berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan.

4. Kamera:

berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **a. Pengolahan Data**

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

1. *Editing* data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. *Koding data* adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian ke pustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberikode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

#### **b. Analisis Data**

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.

#### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Suatu peneliti diorientasikan pada derajat keilmiahannya data penelitian. maka suatu peneliti dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektif maka peneliti tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya.

Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi dalam pengujian penelitian merupakan teknik pengujian kredibilitas data yang diperoleh dengan melakukan pengecekan atau perbandingan dengan sumber data lainnya, misalnya; triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode dan triangulasi dengan teori.<sup>4</sup> Tetapi triangulasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data penelitian.




---

<sup>4</sup>Junaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 322-323.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. SEJARAH SINGKAT, TUGAS FUNGSI, DAN DASAR HUKUM BALAI HARTA PENINGGALAN**

##### **a. Sejarah singkat Balai Harta Peninggalan**

###### **1. Visi Balai Harta Peninggalan**

Sebagai unit pelaksana teknis dilingkungan kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Balai Harta Peninggalan memiliki Visi:

*“memberikan perlindungan / terayominya Hak Asasi Manusia, khususnya yang oleh hukum dan penetapan pengadilan di anggap tidak cakap bertindak di bidang hak milik.”*

###### **2. Misi Balai Harta Peninggalan**

Berdasarkan Visi tersebut di atas, Misi Balai Harta Peninggalan:

*“mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan.”*

###### **3. Fungsi Balai Harta peninggalan**

Dalam melaksanakan tugas atau Misinya tersebut, Balai Harta Peninggalan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tanggal 19 juni 1980 tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi Balai Harta Peninggalan, mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidak hadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam Perundang-undangan.
- b. Melaksanakan penyelesaian pembukaan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan dengan peraturan Perundang-undangan.
- c. Melaksanakan penyelesaian masalah kepalitan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada dibawah di rektorat perdata, direktorat Jenderal Administrasi hukum umum, kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia republik indonesia. pada hakikatnya tugas Balai Harta Peninggalan adalah:”Mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang atau badan hukum yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Balai Harta Peninggalan pada awal pembentukan diawali dengan masuknya Hindia Belanda ke Indonesia tahun 1596 sebagai pedagang. Dengan semakin banyaknya Bangsa Belanda dan menghasilkan harta atau kekayaan, maka guna mengurus harta-harta tersebut untuk kepentingan para ahli warisnya di Nederland, maka di bentuk lembaga yang di beri nama West En Boedelkamer (Balai Harta Peninggalan) pada tanggal 1 Oktober 1624 berkedudukan di Jakarta. Untuk menjangkau wilayah

Indonesia yang sangat luas, maka menyusul di bentuk lagi Balai Harta Peninggalan Medan, Semarang, Surabaya, Makassar. Bahkan dihampiri tiap-tiap Karisidenan atau Kabupaten pada awal itu di bentuk lagi Balai Harta Peninggalan yang merupakan kantor perwakilan. Sedangkan untuk Balai Harta Peninggalan Jakarta mempunyai kantor perwakilan di Bandung, Cirebon, Bogor, Sukabumi, Serang, Lampung, Palembang, Pangkajene, Pontianak dan Singkawang.

Seiring perkembangan dan perubahan sistem Hukum di Indonesia, tahun 1987 semua perwakilan BHP diseluruh Indonesia dihapuskan sesuai keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987. Saat ini hanya ada lima Balai Harta Peninggalan di Indonesia yaitu: Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar, dan masing-masing meliputi wilayah kerja di daerah tingkat I dan tingkat II. Sesuai peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 1 Maret 2005 Nomor: M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan tata kerja kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana teknis berada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah divisi pelayanan Hukum dan HAM, namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal administrasi hukum umum melalui direktur perdata.



b. Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan

Dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 dan 3 surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan dapat di kemukakan bahwa tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan adalah sebagai berikut:

1. Selaku wali pengawas dan wali sementara dalam perwalian (pasal 366, 359 KUH Perdata, pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
2. Pengampu pengawas dalam pengampu dan pengampuan anak dalam kandungan (pasal 348, 449 KUH Perdata)
3. Pembukaan dan pendaftaran surat wasiat (tertutup/rahasia dan wasiat umu, pasal 937, 942 KUH Perdata dan Pasal 41, 42)
4. Pengurus atas Harta Peninggalan yang ada kuasanya (pasal 1126-1128 KUH Perdata. Pasal 64 sampai dengan 69 intruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia.
5. Mewakili dan mengurus harta kekayaan orang yang di nyatakan tidak hadir (pasal 463 KUH Perdata)
6. Kurator dalam kepalitan (pasal 70 ayat 1 undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

7. Pembuatan surat keterangan hak mewarisi bagi warga Negara Indonesia keturunan warga timur asing (pasal 14 ayat 1 instruksi Van de Gouvernment Landmeters).
8. Mengurus harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 370 KUH Perdata)
9. Membuat surat keterangan waris bagi golongan Timur Asing selain Cina (Pasal 14 ayat 1) instruksi bagi para pejabat pendaftaran tanah di Indonesia dan mereka yang bertindak sedemikian.
10. Melakukan pemecahan dan pembagian waris (Pasal 1071 KUH Perdata)
11. Melakukan pengelolaan dan pengembangan uang pihak ketika Balai Harta Peninggalan berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman. (penyatuan masa dari kas-kas Balai Harta Peninggalan dan peraturan tentang pengurusan kas-kas kewarisan anak itu.
12. Melakukan penerimaan dan pengelolaan hasil transfer dana dari Bank dan melakukan penerimaan dan pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja.

Apabila kita kategorikan tugas-tugas Balai Harta Peninggalan sebagai mana tersebut diatas dapat dibagi dalam empat klafikasi yaitu:

1. Pengampu bagi yang tidak cakap bertindak dibidang hak milik, yaitu:
  - a. Melindungi harta warisan dan kepentingan si anak
  - b. Sebagai pengawas wali anak

- c. Pengampu pengawas
- 2. Pengelolaan uang pihak ketiga, karena tidak diketahui pemiliknya.
  - a. Uang yang berasal dari orang tidak hadir
  - b. Uang yang berasal dari harta tiada kuasanya
  - c. Uang yang berasal dari transfer dana
  - d. Uang yang berasal dari jamostek
- 3. Bidang hak waris
  - a. Membuat surat keterangan mewarisi
  - b. Mendaftar wasiat yang sudah terbuka
  - c. Membuka wasiat tertutup
  - d. Pemecahan dan pembagian waris
- 4. Bidang kepalitan
  - a. Demi hukum sebagai kurator Negara
  - b. Pengurus PKPU
  - c. Likwidator PT

Penampung dana jaminan kematian dan jaminan hari tua dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai ahli waris dan wasiat (Pasal 22 ayat 3, Pasal 26 ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2012 tentang perubahan kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja peraturan menteri hukum dan HAM RI No. 13 tahun 2013 tentang penerimaan dan pengelolaan

dana program jaminan sosial tenaga kerja pada Balai Harta Peninggalan).

c. Dasar hukum Balai Harta Peninggalan

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) tentang Balai Harta Peninggalan:

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan PKPU

Undang-undang Nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01. PR. 07. 01-08 tahun 1980 tentang organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan. Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang penerimaan dan pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja pada Balai Harta Peninggalan.

**B. PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN WALI DAN HARTA ANAK**

Perwalian terjadi jika kekuasaan orang tua terhenti, baik karena salah satu atau keduanya telah meninggal dunia, karena adanya perceraian antara orang tuanya, karena dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, atau karena adanya yang dilahirkan tidak dalam perkawinan yang sah. Tujuan perwalian ini terutama agar harta si anak ada yang mengurus baik pribadinya maupun

harta kekayaannya yang ditinggalkan si mati untuk anaknya. Tugas untuk mengawasi perwalian menurut KUH Perdata Pasal 366 dapat di limpahkan kepada Balai Harta Peninggalan dan tanggung jawab BHP sebagai wali pengawas adalah mengawasi wali dalam mengurus harta kekayaan anak dibawah umur. Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Palopo bahwa seorang wali telah nekat menjual harta warisan si anak yaitu mobil, dan salah satu Paman dari si pewaris tersebut keberatan karena mengetahui bahwa wali dari si pewaris itu telah menjual salah satu warisan milik keponakannya itu, dan melaporkannya di Balai Harta Peninggalan dan putusan akhirnya di menangkan oleh Paman dari si pewaris itu harta yang telah di jual oleh wali si pewaris kembali, maka dari itu Balai Harta Peninggalan berhak mencabut wewenang dan memecat wali dari si pewaris tersebut karena telah melanggar aturan dan melalikan tugasnya sebagai wali, dalam Pasal 418 KUH Perdata yang berisikan *"Balai-balai (Balai Harta Peninggalan) dan dewan-dewan (dewan perwakilan) tidak boleh di kesampingkan dari segala campur tangan yang di perintahkan kepada mereka dalam ketentuan Undang-undang"* dikatakan senjata pamungkas Balai Harta Peninggalan ketika maju di persidangan untuk menjaga dan melindungi hak waris anak

Adapun kebijakan operasional tugas pokok Balai Harta Peninggalan dapat diperinci sebagai berikut:

1. Mengampu .

Kewajiban wali pengawas adalah mewakili kepentingan-kepentingan anak yang belum dewasa, untuk itu Balai Harta Peninggalan boleh

memaksa wali membuat inventaris atau pemerincian barang-barang harta peninggalan dalam segala warisan yang jatuh pada si anak yang belum dewasa, menurut hukum perwalian ada tiga macam yaitu: Perwalian oleh suami istri hidup paling lama dengan demikian berarti orang tua yang terlama hidup dengan sendirinya menjadi wali, Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akte tersendiri, Perwalian di angkat oleh Hakim. Wali-wali ini harus menunaikan perwaliannya yang di percayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati, wali-wali ini juga berkewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas tentang perwalian tersebut dan apabila mereka lalai maka boleh dipecat sebagai wali. Balai Harta Peninggalan juga dapat sebagai pengampu apabila orang tua laki-laki meninggal, sang ibu pada saat itu sedang mengandung dan kalau anak itu kemudian lahir maka sang ibu dengan sendirinya (menurut hukum) menjadi wali dan Balai Harta Peninggalan menjadi wali pengawas.

Tugas Balai Harta Peninggalan tercantum dalam ayat terakhir pasal 359 KUH Perdata yang bersangkutan paut dengan perwalian dan pengawas wali yang diangkat ditetapkan oleh Hakim atas permohonan yang diajukan oleh keluarga terdekat si anak tersebut. Sementara penetapan pengangkatan wali dari Pengadilan Negeri belum ada maka kemungkinan sekali keadaan sudah mendesak agar diadakan tindakan seperlunya demi kepentingan anak yang belum dewasa tersebut, dalam keadaan demikian apabila dipandang perlu Balai Harta Peninggalan mengadakan tindakan-

tindakan seperlunya guna mengurus diri dan harta kekayaan anak, tindakan-tindakan tersebut antara lain mengadakan inventerisasi atas harta kekayaan si anak serta mewakili anak tersebut dalam suatu tindakan hukum. Tugas Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus atas diri dan harta kekayaan anak belum dewasa akan berakhir ketika wali untuknya telah diangkat atau ditetapkan oleh pengadilan Negeri dengan diangkatnya seorang wali maka tugas Balai Harta Peninggalan selanjutnya berubah menjadi wali pengawas.

Tugas Balai Harta Peninggalan sebagai pengawas wali diatur dalam pasal 366 KUH Perdata yang menyebutkan "dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berkewajiban melakukan tugas wali pengawas". Adapun tugas sebagai wali pengawas, Balai Harta Peninggalan bertindak untuk mengamati-amati apakah wali melaksanakan kewajiban dengan baik atau tidak dan seberapa perlu memberikan nasihat-nasihat kepada wali untuk melakukan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, kewajiban wali yang harus diperhatikan oleh Balai Harta Peninggalan antara lain:

- a. Dalam tenggang waktu 3 bulan setelah terjadinya kematian penyelenggarakan pendaftaran harta kekayaan suami/istri (Pasal 127 KUH Perdata)
- b. Apabila wali lalai untuk melaksanakan tugasnya tersebut, maka wali pengawas dapat memaksakan agar pendaftaran itu dilakukan (Pasal 370 ayat 2 KUH Perdata)

- c. Menyelenggarakan pengurusan harta kekayaan anak dibawah umur itu dengan baik sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 371 KUH Perdata).
- d. Tiap tahun wali berkewajiban memberikan perhitungan dan tanggung jawab atas pengurusan yang sudah di lakukan (pasal 372 KUH Perdata)
- e. Apabila wali enggan melaksanakan kewajibannya maka wali dapat diganti.

Berkaitan dengan kewajiban-kewajiban wali tersebut diatas, maka Balai Harta Peninggalan mempunyai kewajiban.

1. Meminta kepada wali untuk menyelenggarakan pendaftaran harta kekayaan yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa.
2. Mewakili kepentingan anak belum dewasa, apabila kepentingan walinya.
3. Apabila diperlukan memaksakan kepada wali untuk membuat pendaftaran harta kekayaan yang di maksud.
4. Meminta kepada wali untuk menyediakan jaminan secukupnya kepada warisan si anak yang belum dewasa.
5. Meminta perhitungan dan tanggung jawab dari wali.
6. Mengajukan usul kepada Pengadilan Negeri untuk memecat wali dan mengajukan calon wali yang baru.



7. Memberikan keterangan kepada Hakim tentang bermanfaat tidaknya penjualan barang yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa.
8. Mewakili anak belum dewasa melakukan perjanjian sewa menyewa apabila penyewanya adalah wali sendiri.
9. Memberikan kuasa kepada wali untuk bertindak sebagai penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata guna kepentingan anak belum dewasa.
10. Menghadiri acara pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa.
11. Menghadiri acara pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa.

Dari uraian kewajiban wali dan wali pengawas tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa lembaga perwalian dan wali pengawas diadakan oleh perundang-undangan demi kepentingan anak belum dewasa itu sendiri, sehingga hak-hak si anak tidak di langgar.

Tugas pokok Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu atas anak yang masih dalam kandungan, karena manusia merupakan pengembang hak dan kewajiban, dimulai sejak lahir sampai meninggalnya yang bersangkutan. Namun ada kalanya seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap sebagai telah dilahirkan, jika kepentingan anak tersebut menghendaki demikian (Pasal 2 KUH Perdata) ketentuan Pasal 2 KUH Perdata berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 348 KUH

Perdata yang isinya mewajibkan seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya untuk melaporkan kepada Balai Harta Peninggalan ketika suaminya meninggal dan isteri sementara mengandung. Apabila si isteri tersebut berada dalam keadaan hamil maka dengan sendirinya Balai Harta Peninggalan akan bertindak sebagai pengampu atas anak dalam kandungan, sebagai pengampu maka Balai Harta Peninggalan berkewajiban:

1. Membuat berita acara kehamilan
2. Melakukan sesuatu guna melindungi kepentingan anak dalam kandungan tersebut antara lain melakukan inventarisasi atas harta warisan yang ditinggalkan suaminya dan melayani gugat atau menggugat yang kemungkinan timbul dalam warisan yang di maksud.

Tugas Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu anak dalam kandungan akan berakhir ketika anak tersebut dilahirkan. Kelahiran tersebut ada dua kemungkinan yang lahir hidup atau lahir mati. Kalau seandainya anak tersebut lahir mati, maka warisan yang seharusnya akan diterima anak tersebut beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang lain. Sedangkan kalau anak tersebut lahir hidup, maka tugas Balai Harta Peninggalan selanjutnya berubah menjadi wali pengawas.

### ***C. PEMBAGIAN WARIS MENURUT ISLAM***

#### ***a. Hukum Pertama***

Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut:

1. Apabila pewaris (orang yang meninggal) hanya mempunyai seorang anak laki-laki perempuan, maka harta peninggalannya dibagi untuk keduanya. Anak laki-laki mendapat dua bagian sedangkan anak perempuan satu bagian.
2. Apabila ahli waris berjumlah banyak terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan maka bagian untuk laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.
3. Apabila bersama anak (sebagai ahli waris) ada juga ashabul furudh, seperti suami atau istri, ayah atau ibu, maka yang harus diberi terlebih dahulu adalah ashabul furudh. Setelah itu barulah sisa harta peninggalan yang ada dibagikan kepada anak, bagi anak laki-laki dua bagian, sedangkan bagi anak perempuan suatu bagian.
4. Apabila pewaris hanya meninggal satu anak laki-laki, maka anak tersebut mewarisi seluruh anak harta peninggalan meskipun tidak secara sharih (tegas) menyatakan demikian namun pemahaman seperti ini dapat diketahui dari keduanya, bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta.
5. Adapun bagian keturunan dari anak laki-laki (cucu pewaris), jumlah bagian mereka sama seperti anak, apabila sang anak tidak (misalnya meninggal terlebih dahulu), Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu mencakup keturunan anak kandung inilah ketentuan yang telah menjadi ijma.

b. Hukum ke Dua.

Hukum bagian kedua orang tua, untuk dua orang bapak ibu bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh ibu bapaknya saja maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam.

1. Ayah dan ibu masing-masing mendapat seperenam bagian apabila yang meninggal mempunyai keturunan,
2. Apabila si pewaris tidak mempunyai keturunan maka ibunya mendapat bagian sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Sedangkan sisanya yakni dua pertiga menjadi bagian ayah. Hal ini dapat dipahami bagian ibu yaitu sepertiga sedangkan bagian ayah tidak disebutkan, jadi sisanya merupakan bagian ayah.
3. Jika selain kedua orang tua mempunyai saudara dua orang atau lebih, maka ibunya mendapatkan seperenam bagian sedangkan ayah mendapatkan lima perenamnya, adapun saudara-saudara itu tidaklah mendapat bagian harta waris dikarenakan adanya bapak yang ada dalam aturan hukum waris dalam Islam dinyatakan sebagai hajib (penghalang). Jika misalnya muncul pertanyaan apa hikmah dari penghalang saudara pewaris terhadap ibu mereka yang artinya bila tanpa adanya saudara dua orang atau lebih ibu mendapat sepertiga bagian, sedangkan jika ada saudara kandung

pewaris ibu hanya mendapatkan seperenam bagian dikarenakan ayahnya yang menjadi wali dalam pernikahan mereka dan wajib memberi nafkah mereka. Sedangkan ibu tidaklah demikian, jadi kebutuhannya terhadap harta lebih besar dan lebih banyak dibandingkan ibu, yang memang tidak memiliki kewajiban untuk membiayai kehidupan mereka.

#### c. Hukum ke Tiga

Utang orang yang meninggal lebih didahulukan dari pada wasiat, secara zhahir wasiat harus didahulukan ketimbang membayar utang orang yang meninggal, namun secara hakiki utanglah yang mesti terlebih dahulu ditunaikan, jadi utang-utang pewaris terlebih dahulu ditunaikan kemudian barulah melaksanakan wasiat bila memang ia berwasiat sebelum meninggal. Hikmah mendahulukan pembayaran utang dibandingkan melaksanakan wasiat adalah karena utang merupakan keharusan yang tetap ada pada pundak orang yang utang, baik ketika ia masih hidup ataupun sesudah mati, selain itu utang tersebut akan tetap dituntut oleh orang yang memiutangnya, sehingga bila yang berutang meninggal yang memiutangnya akan menuntut para ahli warisnya.

Sedangkan wasiat hanyalah suatu amalan sunnah yang dianjurkan walaupun tidak ditunaikan tidak akan ada orang yang menuntutnya. Disisi lain agar manusia tidak melecahkan wasiat dan jiwa manusia tidak menjadi kikir (khususnya para ahli waris) maka Allah SWT mendahulukan penyebutannya.

#### d. Hukum Ke Empat

Bagi suami atau istri masing-masing mempunyai dua cara pembagian:

Bagian suami:

1. Apabila seorang istri meninggal dan tidak mempunyai keturunan (anak), maka suami mendapat bagian separo dari harta yang ditinggalkan istrinya.
2. Apabila seorang istri meninggal dan ia mempunyai keturunan (anak) maka suami mendapat dari harta yang ditinggalkan

Bagian istri:

1. Apabila seorang suami meninggal dan tidak mempunyai anak (keturunan), maka bagian istri adalah seperempat.
2. Apabila seorang suami meninggal dan dia mempunyai anak (keturunan) maka istri mendapat bagian seperdelapan.

#### e. Hukum ke Lima

Hukum yang berkenaan dengan hak waris saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, jika seorang mati, baik laki-laki maupun yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (se ibu saja) atau seorang saudara perempuan (se ibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris).

Yang dimaksud dengan ikhwah (saudara) adalah laki-laki atau saudara perempuan “seibu lain ayah” jadi tidak mencakup saudara kandung dan tidak pula saudara laki-laki atau saudara perempuan seayah dan lain ibu, pengertian inilah yang disepakati oleh ulama. Adapun ulama menjelaskan bahwa hak waris saudara dari pewaris sebanyak dua kali bagi satu saudara mendapat seperenam bagian, sedangkan bila jumlah saudaranya banyak maka mendapatkan sepertiga dari harta peninggalan dan dibagi secara rata. Jika saudara perempuan jika sendirian mendapat separo harta peninggalan sedangkan bila dua mendapatkan bagian dua per tiga.

Rincian beberapa keadaan bagian saudara seibu:

1. Apabila seorang meninggal dan mempunyai satu orang saudara laki-laki seibu atau satu orang saudara perempuan seibu, maka bagian yang diperolehnya adalah seperenam.
2. Jika yang meninggalkan mempunyai saudara seibu dua orang atau lebih mereka mendapatkan dua per tiga bagian dibagi secara rata. Sebab yang zhahir menunjukkan adanya keharusan untuk dibagi dengan rata sama besar-kecilnya, jadi saudara laki-laki mendapat bagian yang sama dengan bagian saudara perempuan.

f. Hukum ke Enam

Sesudah di penuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sudah dibayar utangnya dengan tidak membebani mudarat (kepada ahli waris), maka dari itu tegaskan bahwa apabila wasiat dan utang nyata-nyata mengandung

kemudharatan, maka wajib untuk tidak dilaksanakan, dampak negatif mengenai wasiat yang dimaksudkan disini, misalnya seorang yang berwasiat untuk menyedekahkan hartanya lebih dari sepertiga. Sedangkan utang yang dimaksud berdampak negatif misalnya seseorang yang mengakui mempunyai utang padahal sebenarnya ia tidak berutang. Jadi baik wasiat atau utang yang dapat menimbulkan mudarat (berdampak negatif) pada ahli waris tidak wajib dilaksanakan.

Hukum keadaan saudara kandung atau seayah.

1. Apabila seseorang meninggal dan hanya mempunyai satu orang saudara kandung perempuan ataupun seayah, maka ahli waris mendapat separo harta peninggalan, bila ternyata pewaris (yang meninggal) tidak mempunyai ayah atau anak.
2. Apabila pewaris mempunyai dua orang saudara kandung perempuan atau seayah ke atas, dan tidak mempunyai ayah atau anak, maka bagian ahli waris adalah dua pertiga dibagi secara rata.
3. apabila pewaris mempunyai banyak saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan atau se ayah, maka bagi ahli waris yang laki-laki mendapatkan dua kali bagian saudara perempuan.
4. Apabila seorang saudara kandung perempuan meninggal, dan ia tidak mempunyai ayah atau anak, maka seluruh harta peninggalannya menjadi bagian saudara kandung laki-lakinya, apabila saudara kandungnya banyak atau lebih dari satu maka dibagi secara rata sesuai jumlah kepala, begitulah hukum bagi



saudara seayah, jika ternyata tidak ada saudara laki-laki yang sekandung atau saudara perempuan yang sekandung.

#### ***D. KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM***

Hukum kewarisan menurut hukum islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi ummat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan.

Dalam pasal 171 kompilasi hukum islam, ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan ini, yaitu:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Sedang kewajiban ahli waris terhadap pewaris menurut ketentuan Pasal 175 KHI adalah:

Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang menyelesaikan wasiat pewaris. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan (Pasal 188 KHI).

Menurut hukum islam hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita (anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan seapak seibu, seapak atau seibu saja). Para

ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki  
10 dari pihak perempuan.

Ahli waris dari pihak laki-laki adalah:

- a. Anak laki-laki (al ibn).
- b. Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya ke bawah (ibnul ibn).
- c. Bapak (al ab).
- d. Datuk, yaitu bapak dari bapak (al jad).
- e. Saudara laki-laki seapak (al akh as syqiq).
- f. Saudara laki-laki seapak (al akh liab).
- g. Saudara laki-laki seibu (al akh lium).
- h. Keponakan laki-laki seibu seapak (ibnul akh as syaqiq).
- i. Keponakan laki-laki seapak (ibnul akh liab).
- j. Paman seibu seapak.
- k. Paman seapak (al ammu liab).
- l. Sepupu laki-laki seibu seapak (ibnul ammy as syaqiq).
- m. Sepupu laki-laki seapak (ibnul ammy as syaqiq).
- n. Suami (az zau).
- o. Laki-laki yang memerdekakan, maksudnya adalah orang yang memerdekakan seseorang.

Hamba apabila sihamba tidak mempunyai ahli waris sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah.

- a. Anak perempuan (al bint).
- b. Cucu perempuan (bintul ibn).

- c. Ibu (al um).
- d. Nenek, yaitu ibunya ibu (al jaddatun).
- e. Nenek dari pihak bapak (al jaddah minal ab).
- f. Saudara perempuan seibu seapak (al uktus syaqiq).
- g. Saudara perempuan seapak (al ukhtu liab).
- h. Saudara perempuan seibu (al ukhtu lium).
- i. Isteri (az zaujah).
- j. Perempuan yang memerdekakan (al mu'tiqah).

Sedangkan bagian masing-masing ahli waris adalah isteri mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian apabila sipewaris mati tidak meninggalkan anak atau cucu dan mendapatkan  $\frac{1}{8}$  apabila sipewaris mempunyai anak atau cucu dan istri tidak pernah terhibab dari ahli waris.

Seorang anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian apabila pewaris mempunyai anak laki-laki. Dua anak perempuan atau lebih, mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. Seorang anak perempuan atau lebih apabila bersama dengan anak laki-laki maka pembagiannya dua berbanding satu (anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian)

Bagian anak laki-laki adalah:

- a. Apabila hanya seorang anak laki-laki saja, maka dia mengambil semua warisan sebagai ashabah, jika tidak ada ahli waris dzawil furudz namun jika ada ahli dzawil furudz maka ia hanya

memperoleh ashabah (sis) setelah dibagikan kepada ahli waris Dzawil Furudz tersebut (Ashabah bin Nafsih).

- b. Apabila anak laki-laki dua orang atau lebih, dan tidak ada anak perempuan, serta ahli waris dzawil furudz yang lain, maka ia membagi rata harta warisan itu, namun jika ada anak perempuan, maka dibagi dua banding satu (Ashabah bil Ghair).

Ibu dalam menerima pusaka atau bagian harta warisan sebagai berikut:

1. Ibu mendapat seperenam, apabila pewaris meninggalkan anak
2. Ibu mendapat sepertiga bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak.

Bagian bapak:

1. Apabila si pewaris mempunyai anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki, maka bapak mendapat  $\frac{1}{6}$  dari harta peninggalan dan sisanya jatuh kepada anak laki-laki
2. Apabila pewaris hanya meninggalkan bapak saja maka bapak mengambil semua hartapeninggalan dengan jalan Ashabah.
3. Apabila pewaris meninggalkan ibu dan bapak maka ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dan bapak mengambil  $\frac{2}{3}$  bagian.

Sedangkan bagian nenek adalah:

1. Apabila seorang pewaris meninggalkan seorang nenek saja, dan tidak meninggalkan ibu, maka nenek mendapat bagian  $\frac{1}{6}$ .

2. Apabila seorang pewaris meninggalkan nenek lebih dari seorang dan tidak meninggalkan ibu, maka nenek mendapat  $\frac{1}{6}$  di bagi rata di antara nenek tersebut.

Menurut hukum waris Islam orang yang tidak berhak mewarisi adalah:

1. Pembunuh pewaris,
2. Orang murtad yaitu keluar dari agama islam.
3. Orang yang berbeda agama dengan pewaris yaitu orang yang tidak menganut agama islam atau kafir.
4. Anak zina, yaitu anak yang lahir karena hubungan diluar nikah.

Perlu diketahui bahwa jika pewaris meninggalkan ibu, maka semua nenek terhalang, baik nenek dari pihak ibu sendiri maupun nenek dari pihak ayah (mahjub hirman). Dan jika semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan adalah hanya anak (baik laki-laki maupun perempuan), ayah, ibu dan janda atau duda sedangkan ahli waris yang lain terhalang (mahjub).

## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

1. tugas Balai Harta Peninggalan mengenai pengurusan harta peninggalan dalam kasus penanganan anak. ?

Dari ketentuan yang termuat dalam pasal 2 dan 3 surat keputusan menteri kehakiman republik indonesia tanggal 19 juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan dapat di kemukakan bahwa tugas pokok dan fungsi balai harta peninggalan adalah sebagai Selaku wali pengawas dan wali sementara dalam perwalian (pasal 366, 359 KUH Perdata, pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pengampu pengawas dalam pengampu dan pengampuan anak dalam kandungan (pasal 348, 449 KUH Perdata) sekaligus Pembukaan dan pendaftaran surat wasiat tertutup atau rahasia dan wasiat umum. Pengurus atas Harta Peninggalan yang ada kuasanya (pasal 1126-1128 KUH Perdata. Mewakili dan mengurus harta kekayaan orang yang di nyatakan tidak hadir dan sebagai Kurator dalam kepalitan Pembuatan surat keterangan hak mewarisi bagi warga negara indonesia keturunan warga tmur asing (pasal 14 ayat 1 instruksi Van de Gouverment Landmeters. Membuat surat keterangan waris bagi golongan Timur Asing selain cina (pasal 14 ayat 1) intruksi bagi para

pejabat pendaftaran tanah di indonesia dan mereka yang bertindak sedemikian.

2. cara pembagian Harta warisan.

Apabila pewaris (orang yang meninggal) hanya mempunyai seorang anak laki-laki perempuan, maka harta peninggalannya di bagi untuk keduanya. Anak laki-laki mendapat dua bagian sedangkan anak perempuan satu bagian, dan apabila ahli waris berjumlah banyak terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan maka bagian untuk laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Sedangkan apabila bersama anak (sebagai ahli waris) ada juga ashabul furudh, seperti suami atau istri, ayah atau ibu, maka yang harus diberi terlebih dahulu adalah ashabul furudh. Setelah itu barulah sisa harta peninggalan yang ada di bagikan kepada anak, bagi anak laki-laki dua bagian, sedangkan bagi anak perempuan suatu bagian. Jika pewaris hanya meninggalkan satu anak laki-laki, maka anak tersebut mewarisi seluruh anak harta peninggalan meskipun tidak secara sharih (tegas) menyatakan demikian namun pemahaman seperti ini dapat di ketahui dari keduanya, bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta. Adapun bagian keturunan dari anak laki-laki (cucu pewaris), jumlah bagian mereka sama seperti anak, apabila sang anak tidak (misalnya meninggal terlebih dahulu), Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untu anak-anakmu



mencakup keturunan anak kandung inilah ketetapan yang telah menjadi ijma.

3. pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta dalam kasus penanganan anak.

Hukum kewarisan menurut hukum islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan sangat penting di pelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan islam maka bagi ummat islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah di tinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan di sampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak di tunaikannya hukum islam mengenai kewarisan.

Dalam pasal 171 kompilasi hukum islam, ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan ini, yaitu:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

## **B. SARAN**

1. Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana penyelenggara hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian dengan lingkungan departemen kehakiman, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan melalui Direktorat Perdata. Khususnya dalam masalah kepalitan, di harapkan Balai Harta Peninggalan lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga akan lebih banyak orang yang mengenal dan mempercayakan kepada Balai Harta Peninggalan apabila terjadi kepalitan terhadapnya.
2. Dengan banyaknya harta peninggalan yang tak terurus maka dari itu kinerja Balai Harta Peninggalan sebagai pengawas wali anak harus di tingkatkan agar setiap wali anak tidak mengabaikan tugasnya sebagai wali agar harta dari anak tersebut terlindungi.
3. Hendaknya para wali lebih memperhatikan tugasnya sebagai wali anak agar mengelolah warisan si anak dengan baik di bawah perwaliannya agar harta warisan anak tidak terganggu dan wali anak berkewajiban untuk mengasuh anak yang berada di bawah perwaliannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Amir, Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group 2008)

Abd. Djalal, Maman, *Hukum Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006)

Ash-shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

Almansyur Fauzan dan Junaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,

Ashidueqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqih Muwarris* (Semarang: Pustaka Putra, 1999)

Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002)

Djakaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surakarta Pustaka Mandiri, 2003)

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007).

Efraim, Tana, *Anggota Tehnisi Hukum (ATH) Balai Harta Peninggalan Makassar, Wawancara Pada Tanggal 18 Oktober 2015*

HS. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta Sinar Grafika, 2001)

Istiqamah, *Hukum Perdata di Indonesia* (Makassar Alauddin University Press, 2011)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk pelajar* (Jakarta Timur: Balai Pustaka 2011)

Khairul, Dian, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)

Khalifah, Muhammad Thoha Abu Eka, *Hukum Waris*, (Bandung: Tiga Serangkai, 2007)

Lubis, K. Suhrawardi, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997)

Perangin, Effendi, *Hukum Waris* (Jakarta PT RajaGrafindo Persada)

Rahman, Asymuni A., *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1986)

Rachmad, Budiono, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 1999)

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet, II, 1995)

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung Cv Sinar Baru, 1987)

Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta Sinar Grafika, 2005)

Suparman, Eman, *Pengertian Hukum Waris* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011)

Soeitra, Ronny Hanitidjo, *Metodologi Penelitian*,

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986)

Sugiono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*,

Syarifuddin, Amin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)

Salman, Otje, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ridho Wibowo Lahir Di Barru pada tanggal 6 Juni 1994. Anak pertama dari 3 bersaudara dan merupakan buah cinta dari pasangan Rowandi dan Supamiyarsi. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Inpres 60 Bontoparang pada tahun 1999 dan tamat pada tahun 2005 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Mangarabombang dan tamat pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Mangarabombang dan tamat pada tahun 2011.

Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK) Fakultas Syariah dan Hukum program strata satu (S1) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan pada tahun 2012 penulis juga masuk anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan juga anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).